



ayunda hariyanti_bab1, 2,3,4,5

11%
Suspicious texts



1% Similarities
0% similarities between quotation marks
< 1% among the sources mentioned

2% Unrecognized languages

8% Texts potentially generated by AI

Document name: ayunda hariyanti_bab1, 2,3,4,5.pdf
Document ID: 87d0c0b19e9114d90f7fffad1ef9817291aba897
Original document size: 316.92 KB

Submitter: UMSIDA Perpustakaan
Submission date: 11/5/2025
Upload type: interface
analysis end date: 11/5/2025

Number of words: 6,913
Number of characters: 54,720

Location of similarities in the document:

Sources of similarities

Main source detected

No.	Description	Similarities	Locations	Additional information
1	doi.org https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1320	< 1%		Identical words: < 1% (22 words)

Sources with incidental similarities

No.	Description	Similarities	Locations	Additional information
1	doi.org MENAKAR PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TANA TORAJA... https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183	< 1%		Identical words: < 1% (19 words)
2	doi.org https://doi.org/10.22437/jjiseb.v24i01.13476	< 1%		Identical words: < 1% (20 words)
3	doi.org Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belaja... https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758	< 1%		Identical words: < 1% (17 words)
4	repository.iainkediri.ac.id Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calo... https://repository.iainkediri.ac.id/665/1/9624-27694-1-PB.pdf	< 1%		Identical words: < 1% (10 words)
5	jurnal.umsu.ac.id https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/viewFile/11758/7769	< 1%		Identical words: < 1% (11 words)

Referenced sources (without similarities detected) These sources were cited in the paper without finding any similarities.

1	https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280
2	https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.2376
3	https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906
4	https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.468
5	https://scholar.google.com/citations?user=O

Points of interest

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK KPU KABUPATEN GRESIK

DALAM MENGHADAPI KOTAK KOSONG PADA PILKADA 2024

Ayunda Hariyanti¹, Sufyanto²

¹Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

²Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

* Corresponding Author: Sufyanto@umsida.ac.id

Abstrack : General Elections (Pemilu) and Regional Head Elections (Pilkada) in Indonesia are important mechanisms in democracy, giving people the opportunity to directly elect their leaders. In the 2024 Pilkada, the phenomenon of single candidates and empty boxes emerged in several regions, including Gresik Regency.



Although the General Election Commission (KPU) is responsible for socializing the empty box as a legitimate choice, the socialization carried out is still ineffective, reflected in the high number of voters who chose the empty box (40.28%) and the low level of public understanding. This study analyzes the KPU's communication strategy using Jurgen Habermas's theory of communicative action through four claims of validity of truth, accuracy, honesty, and comprehensibility. Using descriptive qualitative methods and case studies, the results show that although the KPU is committed to neutrality and fairness, there is an imbalance in the delivery of information between single candidates and empty boxes, leading to a gap in public understanding. These findings indicate the need for innovation in the KPU's political communication strategy to improve public understanding and strengthen the quality of democracy in the 2024 Gresik Pilkada.

Keywords : Pilkada, Single Candidate,



KPU, Strategy, Socialization, Communication

INTRODUCTION

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin

negara secara sah. Pemilu juga menjadi mekanisme untuk pergantian

kekuasaan dengan

didasarkan oleh rakyat dan dinyatakan sebagai pilar utama dalam demokrasi (Zulfirman, 2022)

(Harahap et al., 2021). Menurut Syamsudin Haris (2014) Pemilu merupakan sebuah institusi

sekaligus praktik politik yang bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan perwakilan

(representative government) (Rantau, 2022). Dalam konteks lokal, Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) menjadi salah satu hal nyata dari keadilan rakyat yang diterapkan di tingkat Provinsi,

Kabupaten atau Kota. Pilkada memberikan peluang bagi masyarakat untuk memilih secara

langsung pemimpin daerah yang akan mewakili aspirasi dan kebutuhan mereka. Pilkada

dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang kokoh, yakni asas

langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu

memiliki hal suara yang setara tanpa tekanan, dengan pilihan yang tetap terjaga kerahasiaannya

dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Lestari, 2020).

Pemilu dengan adanya penomoran kotak kosong telah diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan Pemilu calon tunggal, dimana pemilih diberikan pilihan untuk mendukung calon atau memilih "kotak kosong". Jika kotak kosong memperoleh suara terbanyak maka kepala daerah sementara akan digantikan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dengan kewenangan terbatas. Ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi Indonesia mengakui pentingnya legitimasi masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah (Roy Marthen Moonti, 2020).

Dalam perkembangan demokrasi pada Pemilu Pilkada pada tahun 2024 yakni fenomena yang muncul adalah calon tunggal atau kotak kosong. Pada Pilkada 2024 terdapat 41 wilayah yang ada di Indonesia yang menghadapi kotak kosong, salah satunya Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur yang memiliki calon tunggal adalah Kabupaten Gresik, dengan mengusung pasangan Fandi Akhmad Yani dan Asluchul Alif. Fandi Akhmad Yani merupakan Bupati Gresik periode sebelumnya yakni menjabat sejak 26 Februari 2021 dan Asluchul Alif yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Gresik sejak 14 September 2021. Kekuatan koalisi yang besar dibangun oleh pasangan ini adalah politik yakni



Sufyanto@umsida.ac.id

Partai Gerindra, PDI-P, PKB, Golkar, PPP, PAN,

Demokrat dan Partai Nasdem. Dominasi

dukungan politik menyebabkan tidak adanya pasangan calon lain, sehingga masyarakat dihadapkan pada pilihan calon tunggal atau kotak kosong.



Dalam situasi ini, komunikasi politik menjadi aspek krusial yang menentukan pemahaman dan pilihan masyarakat. Salah satu aspek penting dalam memberikan sosialisasi tentang penomoran kotak kosong dan calon tunggal adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

KPU memiliki peran khusus dalam mensosialisasikan hal tersebut sebagai pilihan yang sah dalam pemilu. KPU berkewajiban menjaga netralisasi dan memberikan pemahaman yang seimbang kepada masyarakat tanpa memihak kepada calon tunggal ataupun kotak kosong. KPU dalam penyelenggaraan Pilkada Gresik 2024 telah melakukan sosialisasi kotak kosong pada masyarakat. Namun sosialisasi tersebut belum efektif ditandai dengan banyaknya pemilih dalam memilih kotak kosong yakni sekitar 40,28% yang dimana ini merupakan angka yang sangat tinggi dalam persentase pemilih kotak kosong. Dari angka tersebut terlihat jika masyarakat masih belum memahami Pilkada dengan kotak kosong dan calon tunggal dengan baik, ini juga dikarenakan proses strategi komunikasi yang dilakukan masih belum menyentuh lapisan masyarakat Kabupaten Gresik. Tingginya angka pemilih kotak kosong pada Pilkada 2024 menjadi tantangan tersendiri oleh KPU Kabupaten Gresik pasalnya masih rendahnya masyarakat mengetahui tentang kotak kosong dan calon tunggal. Fenomena ini juga menimbulkan gugatan dari Gerakan Persatuan Pribumi (GenPabumi) yang diketuai langsung

oleh Muhammad Ali Murtadlo tentang adanya gugatan tidak adanya sosialisasi kotak kosong dan calon tunggal secara maksimal oleh KPU kepada masyarakat khususnya pada masyarakat Kabupaten Gresik. Dengan adanya fenomena ini KPU Kabupaten Gresik harus melakukan strategi komunikasi politik yang tepat serta melakukan inovasi dalam melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui tentang kotak kosong dan calon tunggal di masa pemilu yang akan datang.

Penelitian terdahulu yang relevan yakni Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020 dengan penulis Prilani Setio Budi dan H. Hutomo. Menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendefinisikan fakta politik. Hasilnya Fenomena calon tunggal di Kabupaten Kediri tahun 2020 terjadi karena semua partai politik membagikan dukungan kepada 1 pasangan calon pasangan yaitu Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Maria Ulfa. Kondisi ini diakibatkan oleh konfigurasi komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang berisi aspirasi tingkat daerah. Pendekatan komunikasi transaksional oleh politik pusat menjadi faktor dominan munculnya calon tunggal. Proses ini tidak hanya menunjukkan dominasi kekuasaan politik pusat, tetapi juga memarginalkan peran aspirasi lokal (Prilani & Hutomo, 2020).

Penelitian sebelumnya yang sesuai adalah Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Menghadapi Fenomena Kotak Kosong di Kabupaten Wonosobo ditulis oleh Ahmad Raziqur Rohis (2022). Metode yang digunakan Quasi Qualitative Desain (QQD) atau Semi Kualitatif. Permasalahan utama yang diangkat adalah fenomena kotak kosong pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020, yang mengakibatkan penurunan tingkat partisipasi pemilih sebesar 11,56%. Penurunan ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran, pemahaman, dan pengetahuan masyarakat mengenai fungsi kotak kosong serta dampak yang ditimbulkan jika kotak kosong menjadi pemenang. Hasil menunjukkan partisipasi politik masyarakat dalam menghadapi fenomena kotak kosong belum optimal. Hal ini tercemin dari perilaku politik masyarakat yang masih pasif, rendahnya partisipasi pemilih, aktivitas politik yang cenderung individu, lalu kurangnya kepercayaan hubungan terhadap organisasi politik terorganisir. Cara KPU Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memaksimalkan sosialisasi terkait isu kotak kosong agar masyarakat lebih memahami, memfasilitasi kegiatan ekstra-parlemen yang diinisiasi oleh aksi sukarela masyarakat, lalu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela dengan membentuk kelompok-kelompok yang lebih terorganisir (Rohis, 2022).

Penelitian selanjutnya adalah Strategi Komunikasi Politik KPU Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Sosialisasi Tahapan Pemilih Umum Tahun 2024, yang ditulis oleh Alfian Muhazir et.al (2023). Penelitian ini menggunakan konsep komunikatif persuasif. Hasilnya menunjukkan bahwa upaya komunikasi politik yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas dalam memperkuat peran komunikasi politik dilakukan melalui interaksi masyarakat secara langsung. Strategi yang diterapkan meliputi perencanaan, komunikasi pesan, serta pengelolaan media komunikasi politik. Tetapi, strategi pengelolaan isu-isu tersebut masih kurang optimal, dimana KPU sedikit tampil di media massa dan kurangnya liputan pemberitaan terkait aktivitas tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, KPU Kabupaten Banyumas memanfaatkan media

sosial sebagai sarana komunikasi alternatif untuk menjangkau khalayak luas yang tidak terjangkau melalui media massa. (Muhazir et al., 2023).

Dari penelitian diatas latar belakang permasalahan yang diambil oleh peneliti adalah bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan KPU dalam mensosialisasikan Pilkada dalam kotak kosong di Kabupaten Gresik pada Pilkada 2024. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU dalam mensosialisasikan kotak kosong Pilkada di Kabupaten Gresik kepada pemilih di Kabupaten Gresik.

Untuk mengetahui bagaimana KPU dalam melakukan sosialisasi Pilkada dalam kotak kosong di Kabupaten Gresik, penelitian ini menggunakan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas. Teori ini dipilih karena untuk menganalisis strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh KPU dalam mensosialisasikan kotak kosong dalam Pilkada di Kabupaten Gresik 2024 kepada pemilih di Kabupaten Gresik. Teori tindakan komunikatif adalah sebuah konsep yang ingin menggugat masyarakat modern terkait rasio yang dicetuskan oleh Habermas. Konsep teori dipakai karena terbentuk sebagai hasil pemikiran Jurgen Habermas yang mengkritik penggunaan rasio instrumental yang berujung pada penindasan manusia oleh manusia. Habermas juga menyatakan hakikatnya manusia selalu komunikatif, tetapi karena sifat kapitalisme dan positivisme yang tumbuh menjadikan satu manusia menjadi objek manusia lain (Subagia, 2019).

Menurut Habermas (1984) untuk mewujudkan tindakan komunikatif yang mampu membuat lawan bicaranya memahami dan menyampaikan pesan yang akan disampaikan dengan cara mencapai validity claims. Menurut Sufyanto (2015) dalam buku selebrasi politik mengatakan bahwa teori tindakan komunikatif membagi klaim menjadi 4 yakni klaim kebenaran (truth), berfokus pada hubungan dengan kesepakatan mengenai dunia alamiah dan objektif. Klaim ini digunakan untuk melihat komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan realitas pemilih dalam mendapatkan informasi terkait kotak kosong. Klaim ketepatan (rightness), berkaitan erat dengan penerapan norma-norma di dunia sosial, hal ini digunakan untuk melihat strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU sudah sesuai dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Klaim autentis atau kejujuran (sincerity), berfokus pada kesepakatan mengenai hubungan antara dunia batin seseorang dan ekspresi. Pada klaim ini berfokus pada strategi yang dilakukan oleh KPU dengan melihat kejujuran dalam mensosialisasikan kotak kosong Pilkada di Kabupaten Gresik sesuai dengan klaim sincerity.



Klaim komprehensibilitas (comprehensibility),

berfokus pada kephahaman antara

kedua belah pihak sehingga tidak ada perdebatan terkait komunikasi yang dilakukan (Sufyanto, 2015).

Jurgen Habermas menekankan bahwa rasionalitas hanya dapat diwujudkan dalam model tindakan komunikatif, dengan tiga alasan utama. Pertama, dalam tindakan instrumental (teleologis), dalam konteks ini menggambarkan KPU dalam menggunakan bahasa secara strategis untuk mencapai tujuan tertentu yakni menyampaikan pesan-pesan yang disusun oleh

KPU dalam mensosialisasikan pilkada kotak kosong serta untuk menyampaikan informasi secara jelas agar pemilih memahami bagaimana konsep dan tujuan dari kebijakan yang disosialisasikan oleh KPU. Kedua, dalam tindakan nilai (normatif), mengedepankan penggunaan bahasa untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang telah ada. Dalam hal ini pesan yang disampaikan oleh KPU tidak hanya informatif tetapi juga mengandung nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, dan partisipasi publik. Ketiga, dalam tindakan dramaturgis, bahasa berperan sebagai media untuk menampilkan citra atau identitas diri. Sementara itu, tindakan komunikatif menempatkan bahasa sebagai sarana komunikasi yang bebas dari tekanan atau dominasi melihat bahasa sebagai medium untuk menampilkan citra dan identitas diri. Dalam konteks ini tindakan dramaturgis dapat melihat strategi komunikasi politik yang dilakukan KPU dalam menampilkan citra profesionalisme, kredibilitas dan netralitas. hal ini dilakukan untuk membangun citra KPU dengan baik dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (Wahyudi, 2021).

METHODOLOGY

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berupa studi kasus.

Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menjelajahi masalah dan fenomena Sentral yang selanjutnya akan di kembangkan dengan lebih rinci (Moleong, L, 2017). Metode ini dipilih karena metode ini lebih menekankan pada kedalaman data dan informasi dari berbagai sumber.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan 3 cara yakni pertama teknik wawancara yang mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi secara mendalam dan terperinci yang akan dilakukan kepada pihak yang berwenang dalam Pilkada Kabupaten Gresik yakni KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pilkada, partai politik yang mengusung pasangan calon tunggal, GENPABUMI sebagai penggugat keputusan terpilihnya pasangan calon tunggal, dan masyarakat sebagai pemilih pada Pilkada 2024. Kedua observasi, yang digunakan untuk mencari tahu bagaimana proses komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik, dengan melakukan pengamatan, mencatat, melihat dan menganalisis dalam masalah penelitian. Ketiga menggunakan dokumentasi, yang dilakukan untuk mendapatkan informasi pendukung dalam analisis dan interpretasi data. Data yang diperoleh dapat berupa foto, dan transkrip wawancara (Thalha et al., n.d.).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman menggunakan analisis secara interaktif. Pada teknik ini dibagi menjadi tiga yakni reduksi data, yaitu proses yang dilakukan dengan memperoleh data dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dipilih yang relevan, bermakna dan relevansi serta difokuskan pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik KPU dalam mensosialisasikan kotak kosong kepada masyarakat. Penyajian data, merupakan proses penyusunan data yang diperoleh mencakup pola komunikasi yang dilakukan KPU, efektivitas strategi yang diterapkan serta tanggapan masyarakat terhadap sosialisasi kotak kosong. Masalah yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya. Penarikan kesimpulan, adalah langkah terakhir dari proses-proses diatas. Dari penarikan kesimpulan merupakan uraian dari seluruh data yang sudah ditentukan dan dianalisis dengan memperhatikan aspek, komponen, faktor dan dimensi

(Zulfirman, 2022).

RESULTS AND DISCUSSION

A. Analisis teori tindakan komunikatif

Analisis pada penelitian ini menggunakan teori tindakan komunikatif dengan melihat 4 klaim yakni klaim kebenaran (truth), klaim ketepatan (rightness), klaim autentis atau kejujuran (sincerity,



dan klaim komprehensibilitas (comprehensibility).

1. Klaim kebenaran (Truth)

Klaim kebenaran (truth) pada teori tindakan komunikatif merupakan elemen penting yang menggambarkan sejauh mana komunikasi mencerminkan kenyataan objektif, terutama dalam konteks penyampaian informasi publik. Hal ini juga menggambarkan pada realitas KPU sebagai penyelenggara. Pilkada terwujud melalui penyampaian informasi kepada pemilih. Klaim ini bukan hanya memberikan komunikasi yang informatif, tetapi juga dibuktikan secara nyata melalui realitas yang terjadi (Rizqian, 2023). Kebenaran merupakan salah satu aspek penting dalam tindakan komunikasi untuk membuktikan informasi yang diberikan sudah sesuai dengan realita yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPU Kabupaten Gresik, Ahmad Taufik, sosialisasi yang dilakukan KPU dalam kegiatan Pilkada Gresik 2024 sudah dilaksanakan. Bentuk pelaksanaan kegiatan ini ada dua yakni melalui tatap muka dan secara langsung. Hal ini dilakukan agar informasi yang diberikan dapat diterima diseluruh kalangan masyarakat Kabupate Gresik mengenai kotak kosong dan calon tunggal.

"Kami menggandeng organisasi masyarakat, mahasiswa, wartawan, dan stakholder untuk membantu sosialisasi hingga tingkat desa dan kecamatan. Kami juga memberikan pembekalan kepada KPPS dan PPS untuk menyampaikan informasi tentang kotak kosong dan calon tunggal. kemudian strategi dalam penyampaian pesan ini kami menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, X, YouTube serta website resmi KPU Kabupaten Gresik." (Taufik – 35 tahun, 21 Maret 2025).

Dari penyebaran informasi yang telah dilakukan oleh KPU menunjukkan bahwa sudah melakukan berbagai cara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Pilkada yang akan diikuti oleh kotak kosong dan calon tunggal. pendekatan bukan hanya melalui tatap muka tetapi juga menggunakan media sosial sebagai media penyebaran informasi yang lebih luas. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Ambarwati (2023) bahwa media

sosial efektif untuk menjangkau segmen masyarakat yang tidak tersentuh oleh sosialisasi secara konvensional.

Berdasarkan data yang diperoleh sebesar 40,28% pemilih memilih kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Gresik 2024 yang menunjukkan bahwa pesan mengenai kotak kosong masih belum bisa diterima secara utuh oleh masyarakat.



Kurangnya pemahaman menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian pesan kotak kosong sebagai pemilih yang sah dengan kolom pada calon tunggal.

Selain itu, rendahnya literasi politik di masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam penyampaian informasi yang sesuai dengan realitas yang ada. Hal ini menyebabkan strategi komunikasi politik yang telah dilakukan oleh KPU masih belum berhasil. Sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilih aktif yakni Miftakhul (17 Maret 2025) yang menyatakan bahwa,

“Menurut saya, upaya sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan oleh KPU kepada masyarakat masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya warga yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pemilihan dengan calon tunggal dan kolom kosong dalam surat suara. Hal ini juga membuat masyarakat menjadi

malas untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Gresik 2024”.

(Miftakhul – 22 tahun, 17 Maret 2025)

Dari pernyataan informan di atas, salah satu penyebab menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada adalah masyarakat masih kurang memahami secara penuh bagaimana mekanisme pada Pilkada 2024. Kemudian berdasarkan data yang dihimpun dari seluruh kecamatan menunjukkan, rata-rata persentase partisipasi pada pemilih tercacar sebesar 66,85%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan ketertarikan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Pemilih tidak memahami pentingnya kotak kosong cenderung menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak berarti, sehingga menurunkan tingkat partisipasi mereka dalam Pilkada.

Dengan demikian, klaim kebenaran dalam konteks strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik belum sepenuhnya terpenuhi. Masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap makna kotak kosong. Kemudian sosialisasi yang dilakukan KPU masih belum menyentuh realitas pemahaman masyarakat. Strategi komunikasi melalui media sosial maupun secara langsung masih belum membentuk kesadaran politik masyarakat secara merata, terutama dalam posisi kotak kosong sebagai alternatif politik yang sah dalam pemilihan dengan calon tunggal.

2. Klaim Ketepatan (Rightness)

Klaim ketepatan pada teori tindakan komunikatif merupakan klaim yang merujuk pada sejauh mana tindakan komunikasi dapat diterima secara normatif oleh komunitas sosial. Dalam konteks ini klaim ketepatan menjadi instrumen penting untuk melihat apakah strategi komunikasi yang dilakukan KPU sudah mencerminkan norma-norma yang ada di masyarakat (Bhakti, 2020). Strategi komunikasi politik harus dinilai bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari relevansi terhadap karakter masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPU mengatakan,

"Kami sangat menjaga netralitas, kami tidak berpihak ke calon manapun, karena tugas kami sebagai penyelenggara harus dijalankan dengan integritas dan profesionalisme, ini juga kami tekankan ke seluruh jajaran KPU." (Ahmad Taufik - 35 tahun)

Dari hasil wawancara menunjukkan KPU telah berusaha untuk melakukan netralitas kepada seluruh rangkaian strategi komunikasi politik yang dilakukannya. Hal ini terlihat dari segmentasi yang dilakukan yakni melakukan sosialisasi mahasiswa (Universitas Muhammadiyah Gresik), pemilih pemula (SMAN 1 Menganti), komunitas wartawan Gresik dan pemilih perempuan kristiani. Dari segmentasi yang sudah dilakukan oleh KPU masih belum menjangkau semua kalangan. KPU tidak memanfaatkan lingkungan masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai religius, serta tidak melibatkan seluruh komunitas keagamaan dalam melakukan sosialisasi. Ini juga dipertegas oleh Partai Gerindra Ainul Fitri,

"Partisipasi publik tergolong rendah. Kerja-kerja KPU dalam sosialisasi belum menyentuh seluruh elemen masyarakat." (Ainul - 35 tahun)

Dari hasil wawancara dengan partai Gerindra terlihat jika KPU belum melakukan strategi komunikasi yang tepat kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Komunikasi yang dibangun KPU juga masih kurang mampu memberikan komunikasi yang setara dan menyeluruh. KPU juga kurang dalam memberikan ruang-ruang sosial yang berfokus pada nilai religius masyarakatnya yang menyebabkan kurang efektifnya strategi komunikasi yang dilakukan.

Dengan demikian secara normatif, KPU telah menunjukkan komitmennya terhadap netralitas tetapi dalam praktik sesuai dengan klaim ketepatan masih belum sepenuhnya tercapai. Masih kurang meratanya informasi yang diberikan serta sosialisasi yang dilakukan kurang menyentuh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Gresik.

3. Klaim Kejujuran (Sincerity)

Klaim kejujuran (Sincerity) dalam teori tindakan komunikatif

Jürgen Habermas yang merupakan validitas yang berfokus pada

kesepakatan mengenai hubungan antara dunia batiniah seseorang dengan

ekspresi yang diberikan kepada publik. Dalam konteks Pilkada Kabupaten

Gresik 2024, klaim kejujuran digunakan untuk melihat strategi komunikasi

politik KPU dalam melakukan sosialisasi tentang kotak kosong kepada

pemilih (Meyliana & Erowati, 2020). Hasil wawancara dengan ketua KPU

kabupaten Gresik menyampaikan:

"Kami membuka ruang dialog meskipun belum rutin. Kami

selalu terbuka terhadap undangan dari OPD, organisasi

masyarakat, mahasiswa dan media. Kami siap hadir jika diminta.

Namun memang belum ada forum publik besar yang kami

fasilitasi secara langsung." (Ahmad Taufik – 35 tahun)

Hal ini diperkuat dengan penjelasan di atas menunjukkan bahwa

masih ada kesenjangan antara strategi komunikasi yang dirancang KPU dan

realisasi yang ada di lapangan. Informasi mengenai kotak kosong yang

menjadi isu penting dalam Pilkada belum secara merata disampaikan,

khususnya pada wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh kegiatan

sosialisasi. KPU dinilai masih kurang dalam melakukan komunikasi

dimasyarakat, minimnya forum yang dimiliki oleh KPU menyebabkan

ketidapkahaman masyarakat terhadap informasi mengenai kotak kosong

dan calon tunggal.



Klaim kejujuran tidak hanya diukur dari sikap terbuka secara verbal,

tetapi juga dari tindakan nyata yang mendukung terbentuknya komunikasi

dua arah yang menyeluruh. Strategi komunikasi politik KPU dalam

mensosialisasikan kotak kosong masih belum sepenuhnya memenuhi klaim

kejujuran.

4. Klaim Komprehensibilitas

Klaim komprehensibilitas pada teori tindakan komunikatif Jürgen

Habermas merupakan klaim terakhir yang menekankan bahwa pesan

komunikasi politik yang disampaikan harus dapat dipahami secara jelas

oleh penerima pesan. Pada konteks penelitian ini, digunakan untuk

menganalisis sejauh mana pesan yang disampaikan KPU Kabupaten Gresik

mengenai kotak kosong dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat

Kabupaten Gresik sebagai pemilih aktif pada Pilkada 2024 (Nurfathiyah, 2021).



Komunikasi dianggap berhasil jika pesan yang disampaikan dapat

dipahami secara jelas oleh penerima tanpa menimbulkan ambiguitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KPU dapat dijelaskan bahwa KPU

telah menyampaikan informasi melalui berbagai media seperti media sosial,

forum komunitas, dan pelatihan PPS/KPPS. Namun, penggunaan media sosial

sebagai kanal utama sosialisasi masih belum menyentuh kelompok masyarakat

yang belum akrab dengan platform digital, terutama di daerah pinggiran dan

kelompok usia lanjut.

"Masyarakat yang kecewa terhadap calon kami

mengekspresikannya lewat kotak kosong. Ini tanda pesan politik

belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat Kabupaten

Gresik." (Mujid Riduan, 40 tahun)

Dari hasil wawancara dengan partai PDI-P menunjukkan bahwa

masyarakat yang kecewa terhadap calon tunggal dan melampirkan

kekecewaannya kepada kotak kosong. Hal ini memperlihatkan jika komunikasi

politik yang dibangun oleh KPU masih belum dipahami sepenuhnya oleh

masyarakat. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi yang

jelas yang menyebabkan ketimpangan informasi antara kotak kosong dan

calon tunggal. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan dari wakil ketua partai

Golkar Khamim,

"Ya, mulai dari brosur, pamflet, kemudian IG. Kita sosialisasi

baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kita

sosialisasikan dengan berbagai macam upaya yang dilaksanakan

dengan maksud dan tujuan supaya calon yang diusung itu bisa

memperoleh kemenangan." (Khamim, 40 tahun)

Dari hasil wawancara diatas dengan partai Golkar menunjukkan bahwa

walaupun struktur internal partai sudah menyampaikan informasi kepada

semua lapisan dari tingkat atas hingga tingkat bawah tetapi kenyataan

dilapangan masih banyak masyarakat yang masih belum memahami pemilihan

dengan kotak kosong dan calon tunggal. Partai Golkar telah melakukan

penyampaian informasi melalui media digital seperti Instagram, pamflet dan

media cetak, tetapi penerimaan masyarakat tentang kotak kosong dan calon

tunggal masih belum merata.

Pesan yang disampaikan belum sepenuhnya dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. Minimnya pengetahuan tentang prosedur kotak kosong dan calon tunggal menjadi bukti bahwa komunikasi yang dilakukan oleh KPU masih belum efektif. Banyak masyarakat yang berangapan "golput" sebagai dukungan kepada kotak kosong, ini menyebabkan kesalahpahaman dalam proses demokrasi. Menurut Nazwa Putri Septiani, et al. (2025) fenomena kotak kosong sering kali dipandang sebagai bentuk protes masyarakat terhadap kualitas calon yang ditawarkan oleh partai politik, sehingga menyebabkan tidak idealnya kondisi sosial politik yang ada.

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa klaim komprehensibilitas masih belum terpenuhi dengan baik. Terdapat kesenjangan yang nyata antara pesan yang ingin disampaikan oleh KPU dan pemahaman masyarakat terhadap pesan yang disampaikan. Adanya rasa kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat, baik terhadap proses pencalonan tunggal maupun terhadap pilihan kotak kosong, menjadi bukti bahwa komunikasi belum berhasil membangun pemahaman secara keseluruhan yang mendukung kualitas demokrasi secara nyata.

B. Analisis Rasionalitas Strategi KPU dalam Perspektif Tindakan Komunikatif

Analisis rasionalitas merupakan salah satu model tindakan yang ada teori tindakan komunikatif menurut Jurgen Habermas. Pada analisis rasionalitas dibagi menjadi tiga yakni tindakan teleologis, tindakan normatif dan tindakan dramaturgis.

1. Tindakan Teleologis

Tindakan teleologis pada analisis rasionalitas dalam teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu dengan menggunakan sarana atau cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Gresik memiliki tujuan utama yakni menyampaikan pesan-pesan yang telah dirancang dalam mensosialisasikan pilkada dengan opsi kotak kosong. Tujuan utama dari komunikasi ini adalah untuk memastikan bahwa pemilih memahami konsep dan tujuan dari kebijakan yang disosialisasikan oleh KPU (M. Ied Al Munir, 2023).

KPU Kabupaten Gresik telah menjalankan berbagai strategi komunikasi untuk menjangkau pemilih dari berbagai kalangan. Dari hasil data wawancara yang telah disampaikan oleh ketua KPU Ahamad Taufik menjelaskan bahwa, pihaknya telah melakukan berbagai strategi komunikasi dengan masyarakat. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah dengan menyebarkan informasi melalui berbagai media komunikasi seperti media sosial, melakukan pertemuan langsung dengan forum komunitas dan memberikan pelatihan kepada PPS dan KPPS. Selain itu, KPU juga melakukan

kerja sama dengan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, mahasiswa, dan wartawan untuk membantu menyampaikan informasi hingga tingkat desa dan kecamatan.

Kemudian strategi komunikasi politik yang dilakukan secara segmentatif yakni menasar para pelajar SMA, mahasiswa, dan komunitas perempuan. Strategi ini dipilih untuk menunjukkan bahwa KPU telah menggunakan berbagai cara untuk menjangkau kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk mensosialisasikan tentang kotak kosong dan calon tunggal. Efektivitas strategi komunikasi yang sudah dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Terlihat dari hasil wawancara dengan Miftakhul menyampaikan,

“Untuk sosialisasi sendiri itu sebenarnya belum dilakukan secara menyeluruh, jadi masih ada masyarakat yang belum mengerti terkait pesan-pesan tersebut. Yang benar-benar terbantu hanya sebagian kecil saja.”

(Miftakhul - 22 tahun)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat jika strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPU masih belum menasar berbagai kalangan,

mengakibatkan pesan-pesan yang disampaikan masih belum dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh KPU masih belum sejalan dengan tindakan teleologis yakni dalam menyampaikan pesan dengan jelas dan meningkatkan pemahaman masyarakat masih belum sepenuhnya tercapai. Dengan kurang tercapainya pemahaman masyarakat, tindakan teleologis belum tercapai dengan baik. KPU perlu melakukan pendekatan komunikasi yang lebih untuk pesan pada strategi komunikasi politik pada sosialisasi Pilkada dengan pilihan kotak kosong secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat.



2. Tindakan Normatif

Dalam konteks tindakan normatif, penggunaan bahasa diutamakan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan oleh (KPU) tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mengandung nilai-nilai penting seperti demokrasi, keadilan, dan partisipasi publik (Wahyudi, 2021). Dalam konteks ini, strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik bukan hanya menyampaikan informasi secara teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial, kultural, dan religius yang hidup dalam masyarakat Gresik.

Kabupaten Gresik merupakan wilayah dengan karakter masyarakat yang religius, komunal, dan sangat menghargai peran tokoh agama, pesantren, serta forum keagamaan dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini, strategi

komunikasi politik KPU Gresik hanya difokuskan pada media sosial dan komunitas tertentu dinilai belum menyentuh struktur nilai dominan yang hidup di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa KPU belum sepenuhnya memanfaatkan saluran komunikasi yang sesuai dengan masyarakat Kabupaten Gresik. Dari hasil wawancara dengan ketua KPU memperlihatkan bahwa sosialisasi KPU masih belum menjangkau kalangan keagamaan seperti majelis taklim, pesantren, dan tokoh agama yang justru memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Gresik. Hal ini bertentangan dengan tindakan normatif, komunikasi seharusnya disesuaikan dengan norma sosial yang berlaku agar dapat diterima secara lebih mendalam oleh masyarakat.



Dari sisi masyarakat, pernyataan Miftakhul menunjukkan bahwa sebagian besar warga tidak merasakan kehadiran sosialisasi yang menyentuh kebutuhan dan nilai sosial mereka. Ia menyebutkan bahwa penyampaian informasi oleh KPU masih terkesan formal dan belum menjangkau komunitas-komunitas kecil secara langsung. Ketika norma sosial tidak dihargai dalam strategi komunikasi, maka efektivitas pesan akan melemah secara sosial dan politis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan normatif dalam strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Strategi yang digunakan belum cukup menyentuh dimensi nilai dan norma sosial masyarakat Gresik yang religius dan komunal. Ketidaktepatan ini berdampak pada rendahnya penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan, serta menimbulkan persepsi bahwa sosialisasi tidak berpihak secara adil terhadap semua kelompok. Oleh karena itu, ke depan, strategi komunikasi politik KPU perlu lebih mempertimbangkan pendekatan nilai dan norma yang hidup dalam komunitas lokal agar pesan dapat diterima secara lebih bermakna dan berdampak.

3. Tindakan Dramatugis

Analisis rasionalitas yang terkahir pada teori tindakan komunikatif adalah tindakan dramatugis. Rasionalitas dramatugis berkaitan dengan bagaimana aktor sosial menyampaikan pesan dan membangun citra diri di hadapan publik (Ningsih and Mahfudloh 2024). Dalam konteks ini, KPU Kabupaten Gresik berupaya membentuk citra sebagai lembaga yang netral, profesional, dan terbuka terhadap partisipasi publik, terutama dalam situasi yang cukup sensitif, yaitu Pilkada dengan calon tunggal dan adanya pilihan

memahami kotak kosong. Penelitian Ahmad Raziqur Rohis (2022) mengenai fenomena kotak kosong pada Pilkada Kabupaten Wonosobo menemukan, bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang kotak kosong menyebabkan penurunan partisipasi pemilih sebesar 11,56%. Penurunan partisipasi ini tercemin dari perilaku politik masyarakat yang masih pasif, rendahnya partisipasi pemilih, aktivitas politik yang cenderung individu, lalu kurangnya kepercayaan hubungan terhadap organisasi politik terorganisir. Hal ini memiliki kesamaan dengan hasil temuan dalam penelitian pada strategi komunikasi politik KPU dalam mensosialisasikan kotak kosong pada Pilkada 2024. Hasilnya KPU sudah melakukan berbagai upaya dalam melakukan sosialisasi seperti secara tatap muka dengan mahasiswa, siswa, komunitas dan pemilih perempuan nasrani, serta melalui berbagai media sosial yang dimiliki oleh KPU, pesan yang disampaikan masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga menyebabkan penurunan partisipasi pada Pilkada Kabupaten Gresik 2024.

Alfian Muhazir et al (2023) pada penelitiannya strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Banyumas meningkatkan peran sosialisasi tahapan pemilihan umum tahun 2024, menekankan bahwa media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dalam proses sosialisasi. Pemanfaatan media sosial ini bertujuan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Tetapi berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan, tidak adanya keberhasilan dalam menggunakan media sosial karena KPU Kabupaten Gresik sudah memanfaatkan berbagai media sosial untuk melakukan sosialisasi. Tetapi tidak berhasil karena masih adanya kesenjangan antara pesan yang ingin disampaikan dengan pemahaman masyarakat terkait kotak kosong. Kemudian informasi yang diberikan masih belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, yang menyebabkan kurang pemahaman masyarakat terhadap kotak kosong.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Prilani & Hutomo (2020) mengenai Pilkada Kabupaten Kediri tahun 2020 memberikan hasil bahwa fenomena calon tunggal terjadi karena semua partai politik memberikan dukungan kepada satu pasangan calon. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi komunikasi transaksional yang menyebabkan aspirasi masyarakat merasa terpinggirkan. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena calon tunggal di Kabupaten Gresik dipengaruhi tidak hanya oleh faktor komunikasi pusat. Tetapi strategi komunikasi politik KPU dalam menjelaskan pilihan kotak kosong dan calon tunggal kepada masyarakat masih belum optimal. Terlihat dari masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas sehingga pada partisipasi pemilih menurun dan belum optimal. Kurangnya pemahaman ini karena KPU masih belum memenuhi sosialisasi yang inklusif, pemanfaatan media sosial masih belum optimal, dan interaksi langsung dengan masyarakat masih kurang.

Pembahasan pada hasil penelitian lebih mendalam tentang penerapan teori tindakan komunikatif dalam konteks strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik terkait dengan Pilkada tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Klaim kebenaran (Truth)

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa, sosialisasi mengenai kotak kosong telah dilakukan oleh KPU dengan menggunakan dua metode.

Metode pertama yakni menggunakan media sosial seperti Instagram,



X,

YouTube, Facebook dan website resmi.

Kedua melakukan sosialisasi secara

tatap muka dengan para pemilih seperti siswa sekolah, mahasiswa, komunitas wartawan dan pemilih perempuan nasrani. Serta memberikan pembekalan kepada KPPS dan PPS untuk menyampaikan informasi tentang kotak kosong.

Berbagai cara telah dilakukan untuk memastikan semua informasi terkait kotak kosong dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan, temuan data menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan tentang kotak kosong masih belum diterima secara

utuh oleh masyarakat. Ini terlihat dari 40,28% pemilih memilih kotak kosong, penyebab utamanya adalah kurang pemahaman masyarakat tentang kotak kosong serta rendahnya literasi di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan sosialisasi yang dilakukan KPU belum optimal karena banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pemilihan dengan calon tunggal dan kotak kosong. Klaim kebenaran dalam konteks ini masih belum terpenuhi, karena masyarakat masih kesulitan dalam memahami makna kotak kosong. Sosialisasi dengan menggunakan media sosial dan bertemu secara langsung masih belum membentuk kesadaran masyarakat pada politik terutama posisi kotak kosong sebagai pilihan alternatif.

2. Klaim Ketepatan (Rightness)

Klaim ketepatan berfokus pada sejauh mana tindakan komunikasi dapat diterima secara normatif oleh komunitas sosial. Strategi komunikasi politik bukan hanya dilihat dari teknis tetapi juga dari karakter masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik. KPU sudah melakukan netralitas dengan tidak berpihak kemanapun, terlihat dari segmentasi yang dilakukan yakni sosialisasi kepada mahasiswa, pemilih pemula atau siswa, komunitas wartawan Gresik dan pemilih perempuan kristiani, tetapi segmentasi yang dilakukan masih belum menjangkau seluruh kalangan. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan Ainul, KPU masih belum melakukan strategi komunikasi yang tepat dan sesuai dengan karakter masyarakat Kabupaten Gresik yakni nilai-nilai religius. KPU tidak berfokus memberikan ruang sosial dengan nilai religius dan menggandeng tokoh-tokoh agama yang menyebabkan kurang meratanya informasi yang diberikan oleh KPU kepada masyarakat.

Klaim ketepatan pada penelitian ini masih belum sepenuhnya tercapai, karena komunikasi yang dibangun oleh KPU belum dapat diterima dengan oleh seluruh lapisan masyarakat. KPU tidak melihat karakter masyarakat yang religius dan sangat terikat dengan norma sosial menyebabkan sosialisasi yang

dilakukan kurang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

3. Klaim kejujuran (Sincerity)

Klaim kejujuran menekankan pada hubungan antara dunia batiniah dengan ekspresi yang diberikan kepada publik. Dari data diatas menunjukkan KPU membukan ruang dialog kepada masyarakat namun KPU akan terbuka jika mendapatkan undangan dari masyarakat untuk melakukan sosialisasi mengenai kotak kosong. Dari keterbatasan ini menyebabkan kurangnya keterlibatan langsung KPU dengan masyarakat yang akan berdampak pada kurangnya pemahaman mendalam masyarakat mengenai pentingnya pilihan kotak kosong sebagai pilihan yang sah.

Adanya perbedaan antara strategi komunikasi yang direncanakan dengan realitas dilapangan. KPU belum secara merata menyampaikan informasi mengenai kotak kosong dan calon tunggal, khususnya di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau. Hal ini menegaskan bahwa klaim kejujuran dalam strategi komunikasi politik KPU belum sepenuhnya tercapai karena keterbukaan dalam komunikasi masih belum sepenuhnya terbentuk.

4. Klaim Komprehensibilitas

Klaim komprehensibilitas merupakan klaim terakhir yang menilai sejauh mana pesan yang disampaikan oleh KPU dapat dipahami dengan jelas

oleh penerima pesan. Kalimat ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh masyarakat Kabupaten Gresik memahami pesan tentang kotak kosong yang disosialisasikan KPU. Dalam realitanya, KPU sudah melakukan sosialisasi dengan berbagai cara mulai dari tatap muka dengan pemilih, menggunakan media sosial hingga memberikan pelatihan kepada PPS/KPPS, tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memahami informasi yang diberikan. Selain itu, adanya kekecewaan yang dirasakan oleh pemilih terhadap pasangan tunggal yang mengakibatkan para pemilih melampiaskan kekecewaannya dengan memilih kotak kosong. Hal ini diperkuat oleh Khamim wakil ketua partai Golkar, mengungkapkan bahwa informasi telah disampaikan melalui berbagai saluran dengan berbagai media tetapi masih banyak masyarakat yang masih belum memahami prosedur kotak kosong dan calon tunggal. ketidakhahaman ini karena KPU masih belum sepenuhnya dalam memberikan informasi mengenai pilihan kotak kosong sebagai pilihan yang sah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan oleh KPU belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat. Kurang pemahaman ini membuat klaim komprehensibilitas pada teori tindakan komunikatif yang digunakan masih belum tercapai dengan baik, karena masyarakat masih belum mendapatkan informasi yang jelas dan tepat dari sosialisasi yang diberikan oleh KPU.

5. Tindakan Teleologis

Tindakan teleologis berfokus pada orientasi pada tujuan tertentu dengan menggunakan sarana atau cara yang paling efektif. pada penelitian ini, KPU sudah menyampaikan pesan-pesan mengenai kotak kosong kepada masyarakat Kabupaten Gresik. Berbagai strategi telah dilakukan, seperti memanfaatkan seluruh media sosial KPU, melakukan pertemuan dengan berbagai forum komunitas dan memberikan pelatihan kepada PPS dan KPPS, melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat, mahasiswa dan wartawan untuk membantu menyampaikan informasi hingga tingkat desa dan kecamatan. Dengan berbagai strategi tersebut, KPU masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. hal ini terlihat dari belum merata serta menyentuh semua kalangan masyarakat yang mengakibatkan pesan yang disampaikan KPU masih belum dipahami dengan jelas oleh berbagai lapisan masyarakat.

Kurang meratanya dalam penyebaran informasi ini membuat tindakan teleologis dalam penelitian ini belum sepenuhnya tercapai. KPU perlu melakukan pendekatan komunikasi dengan menggunakan cara yang efektif yakni melakukan segmentasi dan melihat karakter masyarakat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat Kabupaten Gresik.

6. Tindakan Normatif

Tindakan normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menyampaikan pesan oleh KPU yang memiliki nilai penting seperti demokrasi, keadilan dan partisipasi publik. Masyarakat Kabupaten Gresik merupakan wilayah dengan karakter masyarakat yang religius, komunal dan sangat menghargai para tokoh agama serta banyak forum keagamaan dalam kehidupan sosial, seharusnya menjadi dasar sebagai strategi komunikasi politik KPU. KPU hanya berfokus pada media sosial dan komunitas tertentu tanpa melihat nilai religius yang ada di masyarakat Kabupaten Gresik. Pada hasil

data diatas menyebutkan, sebagian besar masyarakat belum merasakan sosialisasi yang menyeluruh serta belum menjangkau komunitas-komunitas lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Gresik. Ini menunjukkan bahwa norma sosial masih belum diterapkan dengan baik oleh KPU yang mengakibatkan kurang efektifnya sebuah pesan.

Tindakan normatif dalam penelitian ini belum sepenuhnya dijalankan. Strategi yang digunakan belum sepenuhnya menyentuh nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat. Tidak meratanya informasi yang diberikan berdampak pada rendahnya penerimaan masyarakat terhadap pesan yang disampaikan dan menimbulkan persepsi bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU belum berpihak disemua kelompok masyarakat.

7. Tindakan Dramatugis

Tindakan dramaturgis merupakan tindakan terakhir yang ada di analisis rasionalitas pada teori tindakan komunikatif. Tindakan ini berkaitan dengan aktor sosial dalam membangun citra diri di hadapan publik. Dalam konteks ini KPU Kabupaten Gresik telah berusaha membangun citra sebagai lembaga yang netral, profesional dan terbuka terhadap partisipasi publik. Citra yang dibangun oleh KPU belum sepenuhnya diyakini oleh masyarakat. Diperkuat dengan partai Gerindra yang menganggap KPU masih kurang transparan dan memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, khususnya pada kotak kosong. Adanya resistensi diri sebagai kelompok masyarakat yang merasa bahwa KPU belum sepenuhnya membangun kepercayaan publik. adanya keterbatasan dalam penyampaian pesan secara merata menimbulkan keraguan masyarakat terhadap peran KPU dalam memberikan informasi. Dengan adanya keraguan masyarakat terhadap KPU menjadikan tindakan dramaturgis pada penelitian ini belum cukup kuat untuk membangun kepercayaan publik secara merata.

CONCLUSION

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas, pada penelitian strategi komunikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gresik dalam mensosialisasikan kotak kosong pada Pilkada 2024 tidak adanya keberhasilan dalam penelitian. Berbagai strategi telah dilakukan oleh KPU diantaranya pertama melakukan tatap muka dengan para pemilih melalui beberapa forum seperti siswa sekolah, mahasiswa, komunitas wartawan dan pemilih perempuan nasrani. Kedua, melakukan sosialisasi mengenai kotak kosong oleh KPU melalui media sosial seperti Instagram,



Facebook, YouTube, X dan website resmi dari KPU.

Ketiga, menggandeng stakeholder serta memberikan pembekalan kepada KPPS dan PPS dalam menyampaikan informasi mengenai kotak kosong. Berbagai strategi sudah dilakukan oleh KPU baik melalui media massa maupun secara tatap muka, tetapi masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang kotak kosong dan calon pada Pilkada Gresik 2024. Ini terjadi karena pihak KPU belum sepenuhnya melakukan sosialisasi dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gresik. Kurang meratanya sosialisasi ini menyebabkan 40,28% masyarakat memilih kotak kosong, yang menunjukkan kurang adanya penggunaan forum publik yang menyebabkan kurang meratanya pemahaman masyarakat mengenai kotak kosong. Teori tindakan komunikatif belum sepenuhnya berhasil karena strategi yang dilakukan KPU belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Gresik. Dari penelitian ini, strategi komunikasi politik KPU Kabupaten Gresik perlu diperkuat melalui forum-forum publik proaktif, membuat edukasi politik secara menyeluruh dan melibatkan seluruh komunitas dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan

pemahaman masyarakat mengenai kotak kosong pada Pilkada mendatang.



REFERENCES

Ambarwati, R., Aidinil Zetra,
& Syahrizal. (2023). Efektivitas Sosialisasi Pemilu 2019 KPU

Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Niara*, 15(3), 571–580.

<https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.9280>

Bhakti, S. E. (2020). Ruang publik dan media sosial: partisipasi politik mahasiswa indonesia.

Jurnal Kajian Media, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.25139/jkm.v4i1.2376>

Harahap, P. A., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera

Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Jurnal Retentum, 3(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>

Lestari, A. (2019). Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Lex*

LATA, 1(2), 80–90. <https://doi.org/10.28946/lexl.v1i2.468>



doi.org

<https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1320>

M. Ied Al Munir. (2023). DARI KRITIS KE TINDAKAN KOMUNIKATIF (Kritik Jürgen

Habermas terhadap Modernitas dan Rasionalitas). *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi*

Ushuluddin Dan Filsafat, 19(1), 157–179. <https://doi.org/10.24239/rsy.v19i1.1320>

Meyliana, I. F.,



doi.org | MENAKAR PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT KABUPATEN TANA TORAJA TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020

<https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183>

& Erowati, D. (2020). Menakar Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten

Tana Toraja Terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Jurnal*

Academia Praja, 3(2), 168–181. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.183>

Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

In Rake Sarasin. *Remaja Rosdakarya*. <https://scholar.google.com/citations?user=O>



B3ejYAAAAJ&hl=en

Muhazir, A., Miranti, A., & Sayidatina,

K. (2023). Strategi Komunikasi Politik KPU

Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Sosialisasi Tahapan Pemilihan Umum

Tahun 2024. *Jurnal PIKMA: Publikasi Media Dan Cinema*, 5(2), 176–189.

Nurfathiyah, P.



doi.org

<https://doi.org/10.22437/jiseb.v24i01.13476>

(2021). Ruang Publik Dan Komunikasi Dialogis Orang Rimba Di Taman

Nasional Bukit Dua Belas Provinsi Jambi. Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis,

24(01), 1–11. <https://doi.org/10.22437/jiseb.v24i01.13476>

Prilani, P., & Hutomo, S. B. H. (2020). Konfigurasi Komunikasi Politik



repository.iainkediri.ac.id | Konfigurasi Komunikasi Politik atas Fenomena Calon Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020

<https://repository.iainkediri.ac.id/665/1/9624-27694-1-PB.pdf>

atas Fenomena Calon

Tunggal Pada Pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020.

Jurnal Komunikasi, 12(2), 282.



<https://doi.org/10.24912/jk.v12i2.9624>

Rantau, M. I. (2022). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang

Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal Penelitian Dan Karya

Ilmiah, 19(2), 181–193. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>

Rizqian, D. R. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Teori Tindakan

Komunikatif Jurgen Habermas.

Jurnal El-Hamra : Kependidikan Dan Kemasyarakatan,

8(2), 1–21. <https://doi.org/10.62630/elhamra.v8i2.121>

Rohis, A. R. (2022). Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam Menghadapi Fenomena

Kotak Kosong di Kabupaten Wonosobo.

[http://eprints.ipdn.ac.id/7700/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/7700/1/AHMAD RAZIQR](http://eprints.ipdn.ac.id/7700/%0Ahttp://eprints.ipdn.ac.id/7700/1/AHMAD%20RAZIQR)

ROHIS_29.0762_STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DALAM

MENGHADAPI FENOMENA KOTAK KOSONG DI KABUPATEN

WONOSOBO.pdf

Roy Marthen Moonti. (2019). Kemenangan Kotak Kosong (Koko) Dalam Pemilihan Kepala

Daerah.



[Roy Marthen Moonti, 53\(9\), 1689–1699.](#)

Septiani, N. P., Aulia, C. R., Ramadhan, R. A., Haikal, M., Nisa, P. K., Walikota, W., Satu,

D., & Calon,

P. (2025). PERSEPSI PEMILIH TENTANG KAMPANYE KOTAK

KOSONG : KASUS BERITA TIRTO . ID PADA PEMILU 2024. 3(1), 36–52.

Subagia, R. (2019). MARHAENISME SOEKARNO DALAM PERSPEKTIF TEORI

TINDAKAN KOMUNIKATIF JURGEN HABERMAS. 11170331000022.

Sufyanto, D.



INSTRUMEN

PENGUMPULAN DATA.



Wahyudi, P. P. (2021). Sikap Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Tengah terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia: Perspektif Teori Tindakan Komunikatif Jürgen Habermas. *September 2020*, 11–13.

Zulfirman, R. (2022).



doi.org | Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan
<https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>

[Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil](#)

[Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1](#)



jurnal.umsu.ac.id
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/viewFile/11758/7769>

[Medan](#),

Jurnal Penelitian,

Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP, 3(2), 147–153.

<https://doi.org/10.30596/jppp.v3i2.11758>